

Politik Konfesionalisme Lebanon: Sebuah Pilihan atas Keberagaman Agama

Farhan Hibatullah

Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia

e-mail: farhan.hibatullah@ui.ac.id

Abstract

This article discusses the politics of confessionalism, which has become a political choice for the religious diversity of Lebanese society. Political confessionalism is a system of government that proportionally allocates political power based on religion. The diversity of religions in Lebanon is inseparable from its complex historical journey, which then impacts social change in Lebanon. This diversity often causes various problems in Lebanon, even including armed conflict. The most significant armed conflict in Lebanon occurred in the period 1975-1990. This war is strongly influenced by religion because each actor brings their religious identity to the war. This article uses a qualitative method to explain the social changes that occurred until the Lebanese people finally agreed on the politics of confessionalism as a solution to bring socio-political stability to the country.

Keywords: Lebanon, politics of confessionalism, religious diversity, social change

Abstrak

Artikel ini membahas tentang politik konfesionalisme yang telah menjadi sebuah pilihan politik atas keberagaman agama masyarakat Lebanon. Politik konfesionalisme adalah sistem pemerintahan yang secara proporsional mengalokasikan kekuasaan politik berdasarkan agama. Keberagaman agama yang ada di Lebanon tidak terlepas dari perjalanan sejarah yang kompleks, yang kemudian berdampak kepada perubahan sosial di Lebanon. Keberagaman tersebut kerap menimbulkan berbagai masalah di Lebanon, bahkan termasuk konflik bersenjata. Konflik bersenjata terbesar di Lebanon terjadi pada periode tahun 1975-1990. Perang ini sangat dipengaruhi oleh agama karena masing-masing aktor membawa identitas agama mereka dalam berperang. Artikel ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan mengeksplanasi perubahan sosial yang terjadi sampai akhirnya rakyat Lebanon menyepakati politik konfesionalisme sebagai solusi untuk menghadirkan stabilitas sosial politik di negara tersebut.

Kata kunci: keberagaman agama, Lebanon, perubahan sosial, politik konfesionalisme

Pendahuluan

Sejarah Lebanon adalah sebuah cerita tentang berbaurnya budaya dan tradisi serta solusi inovatif yang diciptakan ketika kekuatan-kekuatan yang saling berlawanan digabungkan untuk menjadi sesuatu yang baru. Lebanon memiliki masyarakat heterogen yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama. Lebanon terdiri dari campuran etnis seperti Fenisia, Yunani, Armenia, dan Arab, dan dalam spektrum komunitas Lebanon yang lebih besar terdapat etnis minoritas termasuk etnis Kurdi (Harris, 2014). Keberagaman etnis dan ras di Lebanon tidak terlepas dari perjalanan sejarah Lebanon yang mengalami banyak pengaruh dari beberapa peradaban besar. Orang-orang Fenisia pernah menjadi bangsa penguasa di dataran Lebanon diikuti dengan bangsa Mesir, Yunani, Romawi, dan Arab, dan belum lagi pendudukan Prancis pasca Perang Dunia I (Stanton, 2012).

Banyaknya bangsa berkuasa yang pernah menduduki Lebanon, mempengaruhi struktur sosial di Lebanon dan menghasilkan masyarakat yang heterogen. Hal itu menjadi faktor penting dalam perubahan sosial yang terjadi di Lebanon. Lebanon adalah bangsa yang meliputi campuran dari kelompok budaya, agama, dan etnis yang telah terbangun selama lebih dari 6.000 tahun (Stanton, 2012). Keberagaman etnis tersebut dalam perjalanannya kemudian diikuti oleh keberagaman agama (Arsan, 2020). Seiring perjalanan waktu, terutama pada peristiwa Perang Salib, afiliasi masyarakat Lebanon bergeser dari afiliasi etnis menjadi afiliasi agama (Stanton, 2012). Kondisi tersebut terbawa terus sampai pada terbentuknya negara modern Lebanon dan berperan penting dalam kontestasi politiknya yang kerap berujung konflik.

Secara umum, masyarakat Lebanon mengidentifikasi diri berdasarkan agama mereka. Sebagian besar nama belakang orang-orang Lebanon memiliki asosiasi keagamaan atau dengan kata lain, nama belakang mereka terkait dengan identitas agama. Tempat tinggal masyarakat juga tersebar berdasarkan identitas. Misalnya, kaum Muslim Sunni banyak tinggal di daerah perkotaan, seperti Beirut, Sidon, dan Tripoli. Sementara itu, kaum Muslim Syiah banyak yang hidup di Lebanon selatan. Kaum Kristen Maronit banyak mendiami kawasan pantai. Perang Saudara Lebanon (1975-1990) pada dasarnya adalah sebuah krisis identitas. Lebanon tidak bersatu sebagai sebuah negara dan tidak memiliki identitas nasional (Kisthardt, 2013).

Oleh karena itu, dalam membahas politik Lebanon, identitas aktor menjadi salah satu variabel penting dalam analisis. Berikut ini tabel data demografi Lebanon berdasarkan identitas, pada tahun 1983 (pada era Perang Sipil 1975-1990).

Tabel 1. Populasi Lebanon Tahun 1983 Berdasarkan Identitas

Populasi Lebanon Berdasarkan Identitas	Jumlah (ribu)	Persentase
Kristen	965	39,8
Maronit	580	24,1
Greek Ortodoks	175	7,3
Greek Catholic	100	3,8
Armenia	70	3,0
Lainnya (termasuk Yahudi)	40	1,6
Muslim	1435	60,2
Sunni	600	25
Syiah	655	27,5
Druze	180	7,7
Total	2.400	100

Sumber (Soffer, 1986)

Perang sipil Lebanon yang berlangsung sejak 1975-1990 telah menewaskan lebih dari 144.000 orang, 184.000 terluka, 13.000 kidnapped; dan lebih dari 750.000 warga Lebanon terpaksa mengungsi secara internal (*internally displaced*). Perang ini kemudian diakhiri dengan Perjanjian Thaif yang ditandatangani pada 22 Oktober 1989 di Taif, Saudi Arabia, dan diratifikasi oleh parlemen Lebanon pada bulan November di tahun yang sama. Perjanjian Thaif berisi “new power sharing agreement” agar kekuasaan terbagi secara seimbang antara Kristen dan Muslim (Kisthardt, 2013). Dalam artikel ini, penulis akan menguraikan proses perubahan sosial yang mendorong dipilihnya sistem politik konfesionalisme. Pembahasan selanjutnya akan dibagi dalam beberapa bagian, pertama menjelaskan tentang teori perubahan sosial dan konsep politik konfesionalisme, dilanjutkan dengan beberapa sub bab berisi bahasan tentang kompleksitas sejarah Lebanon kuno, mandat Prancis dan nasionalisme Arab, Republik Lebanon dan Perang Saudara 1975-1990, dan analisis mengenai politik sebuah pilihan atas keberagaman agama di Lebanon.

Teori Perubahan Sosial dan Konsep Politik Konfesionalisme

Menurut Snelbecker ada tiga fungsi teori dalam penelitian. *Pertama*, sebagai pensistematisan temuan-temuan penelitian. *Kedua*, sebagai pendorong untuk menyusun hipotesis yang dapat membimbing peneliti untuk mencari jawaban-jawaban serta membuat prediksi-prediksi atas dasar temuan-temuan itu. *Ketiga*, sebagai penyaji penjelasan dalam menjawab pertanyaan (Forte, 2014). Singkatnya, fungsi teori dalam penelitian adalah sebagai alat bantu bagi peneliti untuk menemukan jawaban dari penelitiannya. Penelitian ini akan menggunakan dua teori, yaitu teori perubahan sosial dan konsep politik konfesionalisme.

Perubahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keadaan yang berubah. Berangkat dari arti di atas maka dapat dikatakan bahwa perubahan bermakna peralihan dari keadaan yang sebelumnya ke keadaan yang baru. Dari pengertian ini maka kita dapat menjelaskan makna perubahan sosial. *Perubahan sosial* secara sederhana dapat diartikan perubahan nilai-nilai sosial atau pola-pola perilaku. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah ketika suatu masyarakat meninggalkan suatu sikap dan mengadopsi sikap lainnya (Schatzki, 2019). Dari penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa perubahan sosial adalah mengenai perubahan di suatu masyarakat dalam segi hubungan dan struktur sosial. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teori perubahan sosial adalah teori mengenai perubahan struktur sosial.

Untuk melihat sistem politik yang digunakan di Lebanon, yang menjadi solusi dari keberagaman sosial, maka peneliti akan menggunakan konsep politik konfesionalisme. Politik konfesionalisme adalah turunan dari teori sistem politik konsosiasionalisme. Politik konsosiasionalisme adalah sebuah sistem politik yang menekankan kepada pembagian kekuasaan. Ilmuwan politik mendefinisikan sistem politik konsosiasional sebagai sistem politik pembagian distribusi kekuasaan politik di negara yang memiliki masyarakat heterogen di mana tidak ada kelompok besar yang menjadi mayoritas, tetapi kondisi politik tetap stabil karena adanya konsultasi di antara para elit kelompok-kelompok tersebut (O'leary, 2005). Sementara itu, konsep politik konfesionalisme adalah sistem pemerintahan yang secara proporsional mengalokasikan kekuasaan politik berdasarkan agama (Rabil, 2011). Jadi, politik konsosiasional hanyalah distribusi kekuasaan politik antar kelompok, sementara politik konfesionalisme adalah distribusi kekuasaan berdasarkan afiliasi agama.

Kompleksitas Sejarah Lebanon Kuno

Sejarah Lebanon adalah sebuah cerita tentang berbaurnya budaya dan tradisi serta solusi inovatif yang diciptakan ketika kekuatan-kekuatan yang saling berlawanan digabungkan untuk menjadi sesuatu yang baru. Lebanon telah lama duduk di

persimpangan di mana arus kebudayaan Timur dan Barat bertemu secara historis. Bangsa-bangsa dari berbagai peradaban, kebudayaan, dan agama pernah silih berganti menjadi penguasa di daratan Lebanon. Setidaknya tercatat beberapa bangsa yang pernah menjadi penguasa dan meninggalkan pengaruh peradabannya di Lebanon, mereka adalah bangsa Fenisia, Mesir, Yunani, Arab, Romawi, dan Turki.

Orang-orang Fenisia yang berasal dari Kanaan adalah bangsa pertama yang mendiami dataran Lebanon sekitar tahun 3000 SM (Harris, 2014). Informasi tentang keberadaan Bangsa Fenisia ditemukan dari surat (teks) diplomatik yang kini berada di Museum Kementerian Luar Negeri Mesir, ditulis dalam huruf paku dan ditemukan di Tell el-Amarna, Mesir Tengah (Stanton, 2012). Bangsa Fenisia kemudian dianeksasi oleh Firaun Mesir, Ramses III, pada 1187 SM. Inilah yang menjadi awal kehadiran pengaruh kebudayaan Mesir Kuno di Lebanon (Hourani, 2010).

Kemudian pada abad ke-9 SM bangsa Asiria masuk dan menguasai dataran Lebanon sebelum akhirnya dikalahkan oleh bangsa Persia melalui Dinasti Akhemeniyah pada tahun 538 SM (Hourani, 2010). Kemudian pada 332 SM Aleksander Agung dalam pengepungan selama delapan bulan berhasil mengambil alih dataran Lebanon, sehingga pengaruh dari peradaban Yunani masuk (Arsan, 2020). Peradaban Yunani kemudian digantikan lagi oleh peradaban Romawi di bawah kekuasaan Theodosius II (Harris, 2014). Selama periode Kekaisaran Romawi, Bahasa Fenisia asli di Lebanon digantikan oleh bahasa Aramea yang menjadi bahasa sehari-hari (Harris, 2014).

Pada abad ke-7 dalam periode Bizantium (Kekaisaran Romawi Timur), sebuah kelompok dari utara Suriah memasuki dataran Lebanon. Kelompok tersebut adalah komunitas Kristen yang didirikan oleh murid-murid Santo Maron yang dikenal dengan sebutan Kristen Maronit (Stanton, 2012). Dalam waktu yang hampir bersamaan di selatan dataran Lebanon datanglah suku-suku Arab yang sebelumnya telah menaklukkan Suriah. Akibat kedatangan suku Arab, masyarakat Lebanon yang tadinya berbahasa Suriah dan Aramea secara bertahap mengadopsi bahasa Arab (Stanton, 2012). Setelah bangsa Arab, kemudian dari arah Persia datanglah kelompok Druze yang merupakan cabang esoterik dari Syiah (Stanton, 2012). Ketika Lebanon menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Dinasti Umayyah Arab pada tahun 661, pengaruh bahasa, kebudayaan Arab, serta Islam Sunni semakin membesar di Lebanon (Stanton, 2012).

Pada akhir abad ke-11, Lebanon menjadi bagian dari kekuasaan Tentara Salib akibat bantuan dari kelompok Kristen Maronit dan sedikit bantuan dari kelompok Druze (Reilly, 2016). Kejadian tersebut merupakan awal dari kiprah politik Kristen Maronit yang di kemudian hari menjadi salah satu kekuatan politik utama di Lebanon. Pada masa inilah afiliasi etnis beralih menuju afiliasi keagamaan. Kemudian pada tahun 1187,

Salahuddin Ayyubi berhasil mengalahkan Tentara Salib dan mengembalikan Lebanon kepada peradaban Islam di bawah Dinasti Ayyubiyah (Reilly, 2016). Setelah 400 tahun berada di bawah peradaban Islam di bawah Dinasti Mamluk, Lebanon diduduki dinasti Islam lainnya, yaitu Utsmaniyah Turki.

Berkuasanya Dinasti Utsmaniyah di Lebanon menjadi pemicu awal terjadinya konflik horizontal di Lebanon. Ketika Dinasti Utsmaniyah melakukan ekspansi ke wilayah Lebanon yang merupakan bagian dari wilayah Dinasti Mamluk, Amir Lebanon untuk Mamluk malah memberikan dukungannya kepada Utsmaniyah. Karena dukungan tersebut, Utsmaniyah kemudian memberikan hadiah kepada sang Amir berupa daerah otonom di sekitar Gunung Lebanon. Sementara itu, Gunung Lebanon sendiri adalah wilayah pemukiman mayoritas Kristen Maronit dan kelompok Druze. Daerah otonomi tersebut kemudian menjadi dipimpin oleh seorang Amir Islam Sunni yang berhak menentukan kebijakan ekonominya sendiri dengan tetap membayar upeti kepada Dinasti Utsmaniyah (Reilly, 2016). Kaum Kristen Maronit kemudian secara bertahap menjadi kekuatan ekonomi di daerah otonomi tersebut, dan sementara kelompok Druze menjadi bagian besar dari pasukan militer (Hourani, 2010).

Semakin kuatnya pengaruh ekonomi Kristen Maronit di daerah otonomi Lebanon kemudian menjadi awal munculnya instabilitas. Kelompok Druze yang merasa kehidupannya di daerah otonom Gunung Lebanon semakin didominasi oleh Kristen Maronit kemudian membantu Amir Bashir II untuk menekan dominasi mereka. Bashir II membangun aliansi dengan kelompok Druze untuk membatasi kekuatan keluarga-keluarga feodal kaum Kristen Maronit yang berkuasa dan untuk mempertahankan kekuasaannya sendiri (Hourani, 2010). Namun Bashir III yang merupakan penerus Amir sebelumnya merupakan pemimpin yang lemah, sehingga membuat kontestasi kekuatan antara kelompok Kristen Maronit dan kelompok Druze semakin tajam.

Hubungan Kristen Maronit, yang dipimpin oleh keluarga feodal, semakin memburuk dengan kelompok Druze, yang berusaha mempertahankan supremasi tradisional mereka. Ketika kekuatan-kekuatan besar Barat masuk, Prancis memberikan dukungannya kepada kelompok Kristen Maronit dan Inggris kepada kelompok Druze, sementara Utsmaniyah mendorong runtuhnya daerah otonom tersebut agar dapat berkuasa penuh di Lebanon (Traboulsi, 2012). Konflik kemudian memuncak ketika Kristen Maronit menjadi korban pembantaian kaum Druze pada tahun 1860 (Hourani, 2010). Sikap politik Utsmaniyah yang condong mendukung kelompok Druze menyebabkan Prancis melakukan intervensi langsung, dengan alasan atas nama kemanusiaan dan persaudaraan sesama Kristen (Reilly, 2016). Intervensi Prancis tersebut kemudian menghasilkan resolusi konflik berupa sebuah sistem pemerintahan yang baru pada tahun 1864, yang menyatakan bahwa Gunung Lebanon adalah daerah

otonom yang dipimpin oleh gubernur Kristen yang ditunjuk langsung oleh Sultan Utsmaniyah Turki (Arsan, 2020).

Mandat Prancis dan Nasionalisme Arab

Pasca-Perang Dunia I dan keruntuhan Dinasti Utsmaniyah Turki, Liga Bangsa-Bangsa memberikan mandat kepada Prancis untuk mengelola Lebanon pada tahun 1923. Melalui mandat tersebut, Prancis kemudian menyatukan seluruh wilayah di sekitar Lebanon menjadi Lebanon Raya yang terdiri dari Gunung Lebanon, Beirut, dan Al-Biqa (Arsan, 2020). Wilayah inilah yang kemudian menjadi Republik Lebanon saat ini. Kristen Maronit yang secara tradisional sangat pro-Prancis menyambut baik hal ini dan selama Prancis memegang mandat ini Kristen Maronit mendapat dukungan dari Prancis. Namun, perluasan wilayah Lebanon dari batas-batas sebelum Perang Dunia I menjadi Lebanon Raya mendatangkan konsekuensi bagi Kristen Maronit, mereka tidak lagi menjadi kelompok mayoritas meskipun tetap menjadi kelompok terbesar, dalam artian jumlahnya berbeda tipis dengan kelompok besar lainnya. Secara demografi, masyarakat Lebanon Raya terbelah dengan jumlah yang hampir sama antara Muslim dan Kristen Maronit (Traboulsi, 2012).

Sebagian besar Muslim Lebanon tidak ingin dikuasai oleh Prancis atau juga menjadi bagian dari Lebanon yang merdeka, mereka lebih menginginkan menjadi bagian dari Suriah (Ouahes, 2018). Hal tersebut berlawanan dengan Kristen Maronit yang mendukung pendudukan Prancis dan mengharapkan kemerdekaan Lebanon dengan tetap menjadi sahabat Prancis (Ouahes, 2018). Hal ini menjadi benih baru perselisihan antara Kristen Maronit dan Muslim di Lebanon. Perjanjian Prancis-Lebanon tentang kemerdekaan dan persahabatan kemudian ditandatangani pada tahun 1936 tetapi tidak diratifikasi oleh pemerintah Prancis sampai tahun 1941 (Ouahes, 2018). Hal ini membuat pemberontakan terhadap Prancis berangsur-angsur terjadi karena kemerdekaan yang ditunggu tak kunjung datang.

Pemberontakan kemerdekaan ini kemudian membawa Muslim dan Kristen Maronit bersatu dalam payung nasionalisme Arab. Nasionalisme Arab yang terjadi pada awal tahun 1940-an ini berdampak terhadap konstelasi politik di Lebanon yang mana membuat tensi antara Kristen Maronit dan Muslim sedikit berkurang (Randal, 2012). Pada tahun 1943 Lebanon akhirnya mendeklarasikan kemerdekaannya dengan memilih sistem pemerintahan parlementer dan bentuk negara Republik. Bishara al-Khuri yang merupakan tokoh nasionalis Kristen Maronit terpilih sebagai presiden pertama Lebanon. Ia kemudian merangkul tokoh Muslim Sunni, Riad al-Sulh, untuk membuat pemerintahan bersama. Para elit Lebanon juga membuat sebuah Pakta Nasional 1943 (Randal, 2012).

Pakta Nasional 1943 berisi empat poin utama, yang kelak pada tahun 1989 sebagiannya diadopsi dalam Perjanjian Taif untuk mengakhiri Perang Saudara 1975-1990. Poin utama pertama dari Pakta Nasional adalah memastikan bahwa Lebanon adalah “entitas netral, mandiri dan berdaulat yang memiliki karakter Arab.” Penekanan atas karakter Arab ini dilakukan untuk menjawab tuduhan bahwa kelompok Maronit berusaha menjauhkan diri dari identitas Arab Lebanon. Poin kedua menyebutkan bahwa Lebanon untuk tidak akan bersekutu dengan Suriah maupun dengan Barat, khususnya Prancis. Poin ketiga dan keempat berisi formula rasio perwakilan Kristen dan Muslim dalam pemerintahan, yaitu 6:5 dan bahwa jabatan Presiden diserahkan kepada kelompok Maronit, Perdana Menteri dijabat oleh Muslim Sunni, dan Ketua Parlemen dijabat oleh Muslim Syiah (Kisthardt, 2013).

Republik Lebanon dan Perang Sipil 1975-1989

Pakta Nasional 1943 menjadi fondasi politik bagi Lebanon. Pakta tersebut mampu mendamaikan konstelasi politik di Lebanon setidaknya sampai pada tahun 1958. Kemudian dengan adanya indikasi kecurangan pada proses pemilihan umum dan dominasi kekuasaan oleh Kristen Maronit, Lebanon menjadi bergejolak. Hal ini menjadi agenda besar pada masa pemerintahan Presiden Camille Chamoun. Masalah juga bertambah karena Chamoun memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser (Hirst, 2011). Penolakan Chamoun untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Inggris dan Prancis atas permintaan Gamal Abdul Nasser yang tengah mengkampanyekan ideologi Pan-Arabisme saat melakukan penyerangan politik terhadap kehadiran Israel di kawasan, membawa dampak kepada konstelasi politik nasional di Lebanon (Hirst, 2011). Kaum Islam Sunni yang condong mendukung ideologi Gamal Abdul Nasser serta mengkritisi dominasi politik dan ekonomi Kristen Maronit menggalang kekuatan untuk melakukan kudeta terhadap Chamoun.

Fuad Chehab, seorang Kristen Maronit yang menjabat sebagai panglima militer Lebanon saat itu, menolak untuk memberantas upaya kudeta yang dilakukan kelompok Muslim Sunni. Dasar penolakan tersebut karena Chehab khawatir pendekatan militer akan memperuncing konflik antara Kristen dan Muslim (Hirst, 2011). Presiden Chamoun kemudian membawa isu tersebut ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, dia menuduh bahwa upaya kudeta itu terjadi karena adanya intervensi dari Republik Persatuan Arab (negara gabungan Mesir dan Suriah—RPA). Khawatir hal serupa terjadi kepada dirinya, yaitu ketika rezim pro-Barat di Irak digulingkan dalam kudeta, Presiden Chamoun segera meminta intervensi militer Amerika Serikat (AS). Pada hari berikutnya Marinir AS mendarat di Beirut (Rowayheb, 2011). Kehadiran pasukan AS ini hanya membawa sedikit efek langsung pada situasi internal, tetapi pemberontakan kemudian perlahan memudar.

Meski konflik internal mereda, namun legitimasi kekuasaan Presiden Chamoun terus menurun. Parlemen Lebanon kemudian mengambil langkah dengan memberikan dukungan terhadap Jenderal Fuad Chehab untuk menjadi presiden menggantikan Chamoun dan menunjuk perwakilan Muslim Sunni, Rashid Karami, untuk menjadi perdana menteri baru. Chehab yang menjadi presiden baru mampu membawa kembali persatuan Lebanon. Kebijakan Chehab sebelumnya, yaitu menolak menyerang Muslim, membuat ia mendapatkan simpati dari masyarakat Muslim (Rabil, 2011). Stabilitas internal semakin kuat dengan kebijakan Chehab untuk menjaga hubungan baik dengan RPA, dan hal ini membuatnya mendapatkan simpati lagi dari Muslim Lebanon (Rabil, 2011). Chehab juga melakukan reformasi kebijakan ekonomi, yang walaupun masih kental dengan sistem semi-feodal, namun dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antara Kristen Maronit dan Muslim Sunni (Rabil, 2011). Chehab juga lalu melakukan reformasi pada undang-undang yang disahkan pada tahun 1959, yang isinya menyatakan jumlah kesetaraan jabatan birokrasi bagi Kristen Maronit dan Muslim Sunni (Traboulsi, 2012).

Fondasi yang dibangun melalui reformasi Fuad Chehab ini kemudian diteruskan dengan baik oleh penerusnya, Charles Helou. Reformasi era Chehab yang dikombinasikan dengan maraknya bisnis minyak, memicu gelombang perubahan sosial ekonomi yang luar biasa di Lebanon, yang menyebabkan peningkatan dramatis dalam mobilitas sosial dan urbanisasi, terutama di Beirut (Traboulsi, 2012). Namun Beirut kemudian menjadi cerminan Lebanon secara keseluruhan, di mana afiliasi agama, perbedaan sosial, dan kesenjangan ekonomi sangat terasa. Polarisasi sosial dan politik di Lebanon semakin meningkat dengan adanya gerakan gerilyawan Palestina yang datang ke Lebanon. Kombinasi keduanya menjadi awal dari munculnya konflik terbesar dalam sejarah Republik Lebanon yang terjadi pada tahun 1975.

Kombinasi kesenjangan ekonomi dan perubahan demografi karena kedatangan pengungsi dan pasukan gerilya Palestina di Lebanon menjadi awal perang sipil yang terjadi pada tahun 1975. Suleiman Franjeh yang terpilih sebagai Presiden Lebanon pada tahun 1970 dianggap gagal menjaga keharmonisan Kristen Maronit dan Islam Sunni di Lebanon. Franjeh, tokoh pemimpin yang berafiliasi kepada klan semi-feodal Kristen Maronit dianggap memiliki kecenderungan untuk melemahkan aparat keamanan negara yang dibangun oleh Chehab (Najem, 2012). Indikasi pelemahan aparat keamanan ini dipandang sebagai upaya untuk memudahkan klan semi-feodal Kristen Maronit melakukan kegiatan ekonominya (O'ballance, 2012). Pelemahan aparat keamanan ini berdampak kepada longgarnya pengawasan di perbatasan Lebanon.

Pengawasan yang lemah di perbatasan Lebanon membuat pengungsi dari Palestina semakin banyak datang. Kedatangan pengungsi ini juga juga diikuti dengan

masuknya gerilyawan Palestina yang telah dipukul oleh militer Suriah. Salah satu kelompok bersenjata yang merupakan gerilyawan yang berafiliasi dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) ini adalah Harakat al-Mahrumin yang didirikan oleh Musa al-Sadr. Kemunculan Harakat al-Mahrumin kemudian diikuti oleh munculnya beberapa pasukan bersenjata lain seperti Muslim Lebanese National Movement (LNM) dan kelompok bersenjata yang terafiliasi kepada Kristen Maronit yang dipimpin oleh Pierre Gamayel (Rabil, 2011). Kemunculan kelompok-kelompok bersenjata di Lebanon pada tahun 1970-an ini tidak dapat dibendung oleh Angkatan Bersenjata Lebanon, yang mana merupakan dampak dari kebijakan Presiden Suleiman Frenjeh yang telah melemahkan kekuatan mereka (O'ballance, 2012).

Beberapa konflik bersenjata antarkelompok sipil bersenjata mulai terjadi di Lebanon, sebagai dampak sentimen Kristen Maronit terhadap kehadiran pasukan gerilya Palestina. Pasukan gerilya Palestina yang mayoritasnya adalah Muslim Sunni kemudian mendapatkan simpati dari kelompok Muslim Sunni Lebanon. Mereka memberikan dukungan dengan membuat kelompok bersenjata tandingan. Banyak pihak menyatakan bahwa perang saudara di Lebanon dimulai pada tanggal 13 April 1975, yaitu ketika kaum Kristen Maronit menyerang sebuah bus yang membawa warga Palestina ke kamp pengungsi di Tall al-Za'tar (O'ballance, 2012). Serangan itu meningkatkan siklus konflik horizontal di Lebanon menjadi pertempuran langsung antara kaum Kristen Maronit yang diwakili oleh Phalangis dengan Muslim Sunni Lebanon yang diwakili oleh LNM (O'ballance, 2012).

Pada bulan-bulan berikutnya, intensitas pertempuran meningkat di Beirut. Hal ini ditandai dengan munculnya "garis hijau" sebagai pembatas antara Muslim Sunni di Beirut Barat dan Kristen Maronit di Beirut Timur (O'ballance, 2012). Meningkatnya tensi pertempuran tersebut juga memecah Angkatan Bersenjata Lebanon terbagi ke afiliasi agamanya masing-masing (O'ballance, 2012). Hal ini membuat disintegrasi Lebanon semakin tajam. Konflik horizontal di Lebanon pada saat itu kemudian menjadi semakin rumit ketika negara-negara sekitar di kawasan Lebanon mulai ikut campur. Setidaknya Suriah dan Israel dilaporkan ikut terlibat dan membuat situasi menjadi semakin rumit.

Suriah dan Israel turut serta pada perang sipil di Lebanon guna melindungi kepentingannya masing-masing. Meskipun pada awalnya pemerintah Suriah memberikan dukungan untuk PLO, namun mereka khawatir bahwa kemenangan LNM-PLO akan membuat Israel terprovokasi untuk menyerang Palestina dan menyeret Suriah ke dalam konfrontasi langsung dengan Israel, yang mana akan menyulitkan Suriah sendiri nantinya. Akibatnya, pada Juni 1976 Suriah melancarkan intervensi besar-besaran untuk memperbaiki ketidakseimbangan di Lebanon dengan mendukung Kristen Maronit. Sementara itu Israel juga memberikan dukungan senjata dan finansial kepada

Kristen Maronit karena menganggap mereka mempunyai satu kepentingan yang sama, yaitu memerangi PLO. Intervensi Israel yang paling signifikan dalam perang sipil Lebanon adalah invasi pada 6 Juni 1982 (Chomsky, 2016). Pasukan Israel dengan cepat melakukan invasi sampai ke pinggiran kota Beirut dan mengepung ibu kota, khususnya ke Beirut Barat.

Dipicu oleh invasi Israel, kelompok Muslim Syiah yang umumnya tinggal di Lebanon selatan (berbatasan dengan Israel) kemudian angkat senjata. Di awal perang saudara, pemimpin Syiah menolak berpihak dan melakukan aksi mogok makan di sekolah 'Amiliya sampai terbentuknya pemerin Pada awal permusuhan bersenjata, pemimpin Syiah, terkejut dan, dikesampingkan oleh perang, menolak untuk memihak dan menyatakan mogok makan di `sekolah Amiliya sampai pembentukan pemerintahan baru dan terbentuknya persatuan nasional. Sebulan kemudian, pada 6 Juni 1975, ia mengumumkan announced penciptaan gerakan Amal, yang kemudian memiliki milisi bersenjata (Hizbullah) (Traboulsi, 2012). Sikap netral kelompok Muslim Syiah didorong oleh janji kelompok Kristen (diwakili Pierre Gemayel) untuk tidak menyerang kawasan yang mereka diami (terutama daerah Nab'a). Namun yang terjadi kemudian, kawasan tersebut tetap diserang dan sekitar 20.000 warga terusir. Peristiwa ini membuat kelompok Muslim Syiah angkat senjata melawan milisi Kristen (Traboulsi, 2012).

Pada Agustus 1982, putra Pierre Gemayel, Bashir Gemayel, seorang pemimpin muda Kristen Maronit yang berhasil menyatukan milisi Kristen Maronit terpilih menjadi presiden. Terpilihnya Bashir Gemayel justru membuat tensi perang sipil di Lebanon meningkat. Bashir kemudian terbunuh dalam sebuah penyerangan setelah menjabat sebagai presiden hanya selama tiga minggu. Sebagai balasan atas penyerangan tersebut, milisi Kristen Maronit di bawah komando Elie Hobeika, diizinkan masuk ke Beirut oleh pasukan Israel. Mereka kemudian membalas dengan membunuh ratusan Muslim Sunni di kamp pengungsi Palestina di Sabra dan Shatila (Fisk,1990). Kemudian saudara Bashir Gemayel, Amin Gemayel, terpilih sebagai presiden pada akhir September 1982. Namun dia gagal meredam konflik yang semakin meningkat (Fisk,1990). Pasukan penjaga perdamaian Barat yang dikirim ke Lebanon pada tahun 1982 juga tidak dapat berbuat banyak. Mereka juga kehilangan banyak korban jiwa, di antaranya karena penghancuran kedutaan AS oleh bom mobil pada bulan April 1983 dan serangan bunuh diri terhadap pasukan multi nasional AS dan Prancis yang ditempatkan di Lebanon pada Oktober 1983 (Chomsky, 2016).

Kehidupan sosial masyarakat Lebanon antara tahun 1985 dan 1989 berubah menjadi *war society*, yaitu ketika berbagai milisi mulai kehilangan integrasi kepada afiliasinya masing-masing. Periode disintegrasi ini dikristalisasi dengan runtuhnya mata uang Lebanon pada tahun 1987 yang secara mengejutkan mampu bertahan selama

sepuluh tahun pertama perang. Runtuhnya nilai mata uang Lebanon menyebabkan periode kesulitan ekonomi dan inflasi yang mendalam (Fisk, 1990). Disintegrasi kelompok bersenjata sangat terasa pada Kristen Maronit yang kemudian terpecah menjadi beberapa faksi. Selanjutnya, ketika masa jabatan Presiden Amin Gemayel berakhir pada 22 September 1988, parlemen sudah tidak dapat lagi menyelenggarakan pemilihan presiden baru. Sebagai hasilnya, Amin Gemayel digantikan Michael Aoun (Hirst, 2011).

Pada tahun 1989, Presiden Michael Aoun yang seorang Kristen Maronit melakukan penyerangan terhadap milisi Kristen Maronit. Penyerangan tersebut adalah sebagai dampak disintegrasi yang terjadi di dalam tubuh Kristen Maronit sendiri. Pada bulan Maret Aoun mendeklarasikan "perang pembebasan" dalam upaya untuk mengusir pengaruh Suriah di Lebanon. Pada bulan September 1989, Aoun menerima gencatan senjata yang dipromosikan oleh komite tripartit yang terdiri dari para pemimpin Aljazair, Maroko, dan Arab Saudi (Traboulsi, 2012).

Politik Konfesionalisme Lebanon sebagai Sebuah Pilihan atas Keberagaman

Gencatan senjata di Lebanon memberikan kesempatan untuk terciptanya resolusi konflik. Pada 22 Oktober 1989, sebagian besar anggota parlemen Lebanon yang terpilih pada tahun 1972 bertemu di Taif, Arab Saudi, dan menerima paket reformasi konstitusi yang memulihkan pemerintahan Lebanon (Traboulsi, 2012). Paket reformasi itu antara lain berisi tentang ratifikasi Pakta Nasional 1943 ke dalam konstitusi, yaitu pembagian jabatan politik antara Kristen Maronit, Muslim Sunni, dan Muslim Syiah. Reformasi tersebut juga berisi tentang pembagian jabatan politik baik di parlemen, kementerian, atau jabatan lainnya berdasarkan rasio komposisi komunitas beragama di Lebanon. Reformasi konstitusi itu kemudian dikenal dengan nama Taif Agreement.

Sebelum Taif Agreement terwujud, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak di Lebanon untuk mengakhiri perang sipil. Pertama, diadakan perundingan dalam kerangka Komite Dialog Nasional dengan mediator Suriah. Dialog tersebut berfokus kepada pembentukan struktur pemerintahan di Lebanon yang dapat diterima masing-masing kelompok (Younes, 2018). Saat perundingan berlangsung, konflik bersenjata di Lebanon semakin meluas sehingga perundingan terpaksa dihentikan pada tahun 1976, lalu Suriah menerjunkan pasukan bersenjatanya dan terlibat langsung dalam pertempuran (Younes, 2018).

Upaya mengakhiri konflik yang kedua terjadi pada tahun 1983, yaitu ketika diadakannya pertemuan antara wakil Kristen Maronit dan Islam Sunni di Jenewa. Perundingan ini kembali diprakarsai Suriah (Younes, 2018). Perundingan tersebut membahas beberapa resolusi konflik, yaitu pembatalan perjanjian keamanan antara

Lebanon dan Israel yang dilakukan pada Mei 1983, yang menyebabkan pasukan Israel ditarik dari Lebanon, serta pengkajian ulang identitas kearaban Lebanon (Chomsky, 2016). Pertemuan di Jenewa ini kemudian sedikit memberi peluang yang lebih luas lagi atas perdamaian di Lebanon karena intervensi negara asing mulai melonggar di Lebanon.

Pada tahun 1985, masih diprakarsai oleh Suriah, diadakan upaya mengakhiri konflik yang ketiga demi terciptanya perdamaian di Lebanon. Pertemuan tersebut dihadiri oleh tiga pimpinan pasukan bersenjata di Lebanon dari masing-masing afiliasi agama, yaitu Muslim Sunni, Muslim Syiah, dan Kristen Maronit (Younes, 2018). Namun kondisi disintegrasi yang telah meluas di Lebanon kembali menjadi faktor penghambat terciptanya perdamaian, sebab ketiga wakil itu sudah sedikit tergerus legitimasinya. Namun pertemuan mereka di atas meja diskusi ini, bukan dalam medan pertempuran, bagaimanapun sudah menjadi perkembangan yang cukup signifikan agar perdamaian di Lebanon tercipta.

Perundingan damai yang keempat dilakukan di Casablanca, Maroko. Perundingan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terciptanya Taif Agreement. Dalam perundingan ini disepakati beberapa hal dasar yang akan dibawa dalam perundingan damai lebih lanjut. *Pertama*, menetapkan perwakilan yang akan mengikuti perundingan damai lebih lanjut. Mereka adalah anggota parlemen terakhir Lebanon dengan alokasi yang setara dari masing-masing afiliasi agama di Lebanon. *Kedua*, menetapkan bahwa jabatan presiden akan tetap diberikan kepada Kristen Maronit sesuai Pakta Nasional 1943, dengan kekuasaan yang dibatasi. *Ketiga*, perdana menteri akan dipilih oleh parlemen dan tidak lagi dipilih langsung oleh presiden sehingga mengurangi dominasi presiden yang berasal dari Kristen Maronit terhadap Muslim Sunni (Younes, 2018).

Menurut Traboulsi (2012), Perjanjian Ta'if sebenarnya mereproduksi sistem sektarian yang dibangun tahun 1943, tetapi dengan modifikasi yang cukup besar dalam hal keseimbangan di antara kelompok agama. Pertama, rasio yang semula ditetapkan dalam perjanjian 1943 (6:5) kini digantikan dengan pembagian yang lebih seimbang dan kursi parlemen ditingkatkan menjadi 128. Kedua, kuota sektarian dihapuskan dari pos-pos pamong praja, kehakiman, tentara dan polisi, dengan pengecualian pejabat di tingkat elit. Artinya, direktur umum di kementerian-kementerian akan dilakukan rotasi antaragama dan tidak ada lagi jabatan direktur yang ditetapkan untuk satu agama atau sekte tertentu.

Lebih penting lagi, hak prerogatif presiden sangat dibatasi demi memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada perdana menteri, kabinet, parlemen dan juru bicara

parlemen, yang semuanya dibagi-bagi berdasarkan agama/sekte (Maronit, Syiah, dan Sunni). Presiden diposisikan sebagai simbol persatuan dan penjaga konstitusi, tetapi kehilangan sebagian besar kekuasaan eksekutif. Dia tetap menghadiri rapat kabinet tetapi tanpa hak untuk memilih (pada masa sebelumnya, presiden akan memimpin rapat kabinet dan kabinet tidak bisa mengeluarkan keputusan dalam ketidakhadirannya). Perdana menteri, yang sebelumnya ditunjuk oleh presiden, kini ditunjuk melalui 'konsultasi' yang dilakukan presiden dengan anggota parlemen, dan presiden terikat oleh keputusan mayoritas. Selain itu, hak untuk membubarkan parlemen yang semula dimiliki presiden kini diserahkan ke kabinet (Traboulsi, 2012).

Berikut ini komposisi parlemen Lebanon berdasarkan identitas agama mereka.

**Tabel 2. Komposisi Anggota Parlemen Lebanon
Pasca-Taif Agreement (Tahun 2000)**

Agama/sekte	Jumlah perwakilan di Parlemen
Sunni	27
Syiah	27
Alawi	2
Druze	8
Maronit	34
Kristen Ortodoks-Yunani	14
Katolik Ortodoks-Yunani	8
Kristen Gregorian-Armenia	5
Katolik Armenia	1
Protestant	1
Minoritas (termasuk Yahudi)	1
Total	128

Sumber tabel: Traboulsi (2012)

Keberagaman di Lebanon tidak terlepas dari perjalanan perubahan sosial yang terjadi sepanjang sejarah mereka. Bangsa Lebanon adalah sebuah bangsa yang mengalami perjalanan sejarah yang kompleks. Kompleksitas sejarah tersebut kemudian membuat bangsa Lebanon mengalami banyak perubahan sosial. Kingsley Davis juga mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat (Davis, 1949).

Silih ganti peradaban yang menjadi penguasa di dataran Lebanon membawa pengaruh terhadap perubahan struktur sosial bangsa Lebanon. Bangsa Fenisia yang menjadi peradaban awal di Lebanon meninggalkan warisan peradaban yang terbentuk

dari struktur-struktur sosial. Mesir kemudian berhasil menganeksasi Lebanon dari bangsa Fenisia dan menyumbangkan pola – pola perilaku dan interaksi sosial yang baru bagi bangsa Lebanon tanpa meninggalkan penuh struktur sosial yang dibentuk oleh bangsa Fenisia. Yunani dan Persia masing – masing dibawah pimpinan Aleksander Agung dan Dinasti Achameid kemudian juga meninggalkan pola – pola perilaku serta interaksi sosial baru bagi bangsa di dataran Lebanon. Sebagai dampak dari silih gantinya kekuasaan politik di Lebanon kemudian membuat struktur sosial di masyarakat Lebanon saat itu menjadi heterogen dengan afiliasi etnis.

Bizantium yang membawa pengaruh nilai-nilai Kristen melalui kelompok Maronit dan suku-suku Arab yang datang pascapenaklukan Suriah oleh pasukan Muslim sekali lagi membawa perubahan sosial di Lebanon. Pengaruh Kristen Maronit dan Bangsa Arab Muslim menjadikan heterogenitas di bangsa Lebanon bergeser dari afiliasi etnis menuju afiliasi agama. Perang Salib kemudian membawa pengaruh terhadap pola-pola perilaku serta interaksi sosial antar afiliasi agama di masyarakat Lebanon menjadi memanas. Heterogenitas berdasarkan afiliasi agama di Lebanon kerap menjadi landasan konflik yang terjadi di Lebanon. Konflik antar afiliasi agama terus menjadi topik utama dalam perjalanan sejarah Lebanon setelah itu sebagai akibat dari peristiwa -peristiwa sejarah yang berdampak pada perubahan struktur sosial masyarakat Lebanon.

Pada saat Lebanon di bawah Mandat Prancis, kelompok Kristen Maronit mendapatkan peranan besar dalam kontestasi politik di Lebanon. Peristiwa tersebut kemudian membawa Kristen Maronit mendapatkan posisi lebih unggul dari kaum Muslim dalam hal akses kekuasaan politik. Hal tersebut kemudian kembali mengubah pola perilaku serta interaksi sosial antar afiliasi agama di Lebanon. Kristen Maronit secara bertahap mendominasi kekuasaan politik di Lebanon. Meskipun kondisi tersebut kembali mengalami perubahan akibat pengaruh dari nasionalisme Arab di kawasan dan Pakta Nasional 1943 yang dibuat setelah Republik Lebanon dideklarasikan.

Pakta Nasional 1943 sempat membawa stabilitas di Lebanon. Pakta Nasional 1943 yang memberikan distribusi kekuasaan di Lebanon berdasarkan afiliasi agama sempat membawa keadaan Lebanon stabil. Tapi Pakta Nasional 1943 yang merupakan sebuah perjanjian tidak tertulis membawa Kristen Maronit secara bertahap kembali menjadi kontestan dominan di sosial politik Lebanon. Hal tersebut ditambah mulai banyaknya pengungsi Muslim Palestina di Lebanon kemudian mengubah demografi Lebanon serta kembali mempengaruhi struktur sosial di Lebanon. Kristen Maronit yang tidak ingin kehilangan dominasinya serta muslim Sunni yang menguat sekali lagi mempengaruhi struktur sosial di Lebanon antarafiliasi agama. Pola perilaku serta interaksi sosial antar afiliasi agama yang sempat mendingin kembali memanas dan puncaknya pecah Perang Saudara pada tahun 1975 sampai pada 1990.

Keberagaman agama di Lebanon yang diwariskan dari peradaban, kebudayaan, dan agama telah berlangsung begitu lama. Ditambah dengan adanya persebaran demografi yang berubah akibat migrasi, maka hal ini berpotensi untuk menimbulkan konflik. Perjalanan sejarah di Lebanon memperlihatkan bahwa konflik yang terjadi di sana selalu berlandaskan afiliasi agama. Masing-masing kelompok afiliasi agama berupaya untuk memperoleh kekuasaan. Dalam kondisi seperti ini maka politik konfesionalisme adalah sebuah pilihan politik yang paling rasional guna menghadirkan stabilitas di tengah masyarakat Lebanon yang beragam. Pada dasarnya politik konfesionalisme adalah sebuah sistem pemerintahan yang menghadirkan keseimbangan dan kesetaraan beberapa kelompok agama atau ras dalam memperoleh kekuasaan politik.

Dalam perkembangannya, meski politik konfesionalisme masih dijalankan, namun bukan berarti Lebanon menjadi bebas dari segala masalah. Serangkaian aksi protes terjadi pascaterjadinya perang saudara periode 1975-1990, karena menurut mereka sistem politik konfesionalisme tidak atau belum terjadi. Sebagai contoh, protes bertajuk Revolusi Cedar pada tahun 2005, mempermasalahkan masih hadirnya tentara Suriah di Lebanon pascaperang sipil (Jaafar dan Stephan, 2009). Kemudian pada tahun 2015 terjadi protes mengenai manajemen limbah pascaperang sipil di Beirut dan Gunung Lebanon (Aljazeera, 2015). Lalu pada akhir tahun 2019 kembali terjadi protes yang mempersoalkan masalah ekonomi di Lebanon, setidaknya sampai saat sebelum persebaran Covid-19 yang menghentikan aksi unjuk rasa itu (Yassine, 2020). Dasar dari protes itu adalah masalah stagnansi ekonomi dan angka pengangguran di Lebanon yang mencapai 46% (The DailyStar, 2018). Selain tentang hal ekonomi, undang-undang yang dianggap melindungi pemerintah dari akuntabilitas publik juga mereka permasalahkan (The DailyStar, 2019). Lalu ada juga protes mengenai kegagalan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik seperti listrik, air, dan sanitasi (Khraiche, 2019). Hal lainnya adalah protes mengenai rancangan undang-undang perpajakan yang baru (BBC, 2019).

Simpulan

Bangsa Lebanon adalah sebuah bangsa yang lahir atas persilangan berbagai peradaban. Masing-masing peradaban tersebut meninggalkan warisan kebudayaan dan agama. Warisan itu kemudian berdampak pada perubahan sosial di Lebanon yang terjadi secara terus-menerus. Perubahan sosial itu kemudian berdampak pada masyarakat Lebanon yang beragam. Afiliasi etnis bergeser menjadi afiliasi agama, terutamanya pada saat Perang Salib terjadi. Afiliasi agama kemudian terus memainkan peran penting dalam perjalanan politik Lebanon modern.

Masing-masing kelompok afiliasi agama yang ada di Lebanon pernah menjadi penguasa di Lebanon. Hal tersebut kemudian membuat pola serta interaksi sosial di Lebanon berpotensi menimbulkan konflik, yang mana kemudian benar-benar terjadi. Salah satu konflik paling besar dalam sejarah Lebanon adalah peristiwa perang saudara 1975-1990. Politik konfesionalisme dipilih sebagai langkah politik paling rasional untuk menjaga stabilitas di Lebanon sampai saat ini. Secara *de facto* sesungguhnya politik konfesionalisme sudah hadir sejak awal deklarasi kemerdekaan Republik Lebanon melalui Pakta Nasional 1943. Melalui Taif Agreement 1990, politik konfesionalisme kemudian dimasukkan ke dalam konstitusi Lebanon sebagai resolusi konflik atas perang sipil. Sampai saat ini politik konfesionalisme masih bertahan dan dijalankan oleh Lebanon. Namun demikian Lebanon hingga kini masih terus mengalami pergolakan di bidang sosial, politik, dan ekonomi sehingga efektivitas politik konfesionalisme ini terus dipertanyakan.

Daftar Pustaka

- Aljazeera. (2015). *Lebanese protest against waste-disposal crisis*. [online]. Dalam: <https://www.aljazeera.com/news/2015/07/lebanon-beirut-trash-rubbish-crisis-150725060723178.html>. [Diakses pada 9 Juni 2020]
- Arsan, A. (2020). *Lebanon: A Country in Fragments*. London: Hurst Publisher
- BBC. (2019). *Lebanon scraps WhatsApp tax as protests rage*. [online]. Dalam: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50095448>. [Diakses pada 9 Juni 2020]
- Chomsky, N. (2016). *The Fateful Triangle: The U.S., Israel, and the Palestinians*. Michigans: Audible Studios.
- Davis, K. (1949). *Human Society*. New York: The Macmillan Company.
- Fisk, R. (2002). *Pity The Nation: Lebanon at War*. Nation Books.
- Forte, J. (2014). *An Introduction to Using Theory in Social Work Practice*. England: Routledge Publisher.
- Harris, W. (2014). *Lebanon: A History, 600 - 2011 (Studies in Middle Eastern History)*. Oxford: University Press.
- Hirst, D. (2011). *Beware of Small States: Lebanon, Battleground of the Middle East*. New York: Bold Type Books.

- Hourani, A. (2010). *A History of the Arab Peoples: With a New Afterword*. Cambridge: Belknap Press: An Imprint of Harvard University Press.
- Jaafar, R., dan Maria, J. S. (2009). "Lebanon's Independence Intifada: How an Unarmed Insurrection Expelled Syrian Forces". Dalam: Maria J. S, ed., *Civilian Jihad: Nonviolent Struggle, Democratization, and Governance in the Middle East*. New York : Palgrave Macmillan publisher.
- Khraiche, D. (2019). Nationwide Protests Erupt in Lebanon as Economic Crisis Deepens. *Bloomberg*, [online]. Dalam: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-17/whatsapp-protests-erupt-in-lebanon-as-economic-crisis-deepens> [Diakses pada 9 Juni 2020].
- Kisthardt, L. (2013). *Confessionalism in Lebanon: Reflection and an analysis of issues*. [online] Collected JCU. Dalam: <http://collected.jcu.edu/honorspapers/15> [Diakses 20 Januari 2021].
- Najem, T. (2012). *Lebanon: The Politics of a Penetrated Society*. England: Routledge Publisher.
- O'ballance, E. (2012). *Civil War in Lebanon, 1975-92*. London: Palgrave Macmillan.
- O'Leary, B. (2005). Debating consociational politics: Normative and explanatory arguments. Dalam: Noel, Sid JR, ed., *From Power Sharing to Democracy: Post-Conflict Institutions in Ethnically Divided Societies*. Montreal: McGill-Queen's Press.
- Ouahes, I. (2018). *Syria and Lebanon Under the French Mandate: Cultural Imperialism and the Workings of Empire*. London: I.B.Tauris.
- Rabil, R. (2011). *Religion, National Identity, and Confessional Politics in Lebanon: The Challenge of Islamism*. London: Palgrave Macmillan
- Randal, J. (2012). *Tragedy of Lebanon: Christian Warlords, Israeli Adventurers, and American Bunglers*. Just World Books.
- Reilly, J, A. (2016). *The Ottoman Cities of Lebanon: Historical Legacy and Identity in the Modern Middle East*. London: I.B.Tauris.
- Rowayheb, M, G. (2011). Political Change and the Outbreak of Civil War: The Case of Lebanon. *Civil Wars*, 13(4), 414-436. DOI: 10.1080/13698249.2011.629871
- Schatzki, T, R. (2019). *Social Change in a Material World*. England: Routledge.
- Soffer, A. (1986). Lebanon: Where Demography Is the Core of Politics and Life. *Middle Eastern Studies*, 22 (2), 197-205.

- Stanton, A. L. (2012). *Cultural Sociology of the Middle East, Asia, and Africa*. California: SAGE Publishing
- The DailyStar. (2018). *Jobless rate at 46 pct, president warns*. [online]. Dalam: <http://www.dailystar.com.lb/Business/Local/2018/Mar-30/443613-jobless-rate-at-46-pct-president-warns.ashx> [Diakses pada 9 Juni 2020].
- The DailyStar. (2019). *Day 76: New Year's Revolution*. [online]. Dalam: <https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Dec-31/498331-day-76-new-years-revolution.ashx> [Diakses pada 9 Juni 2020].
- Traboulsi, F. (2012). *A History of Modern Lebanon*. London: Pluto Press.
- Yassine, H. (2020). First Coronavirus Case Confirmed In Lebanon. The 961, [online]. Dalam: <https://www.the961.com/first-coronavirus-in-lebanon/> [Diakses pada 9 Juni 2020].
- Younes, N, Y. (2018). *Restoring Lebanon*. Bloomington: iUniverse.